

KONFLIK PADA KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DAN SOLUSI PENYELESAIANNYA

Eko Setiawan¹⁾

¹⁾ Program Studi Sosiologi Universitas Brawijaya, Malang-Indonesia
Author Coresponding : oke.setia@gmail.com

ABSTRACT

Conflict since 2000 between the community and alas purwo national park, triggered by the encroachment of forest areas by the community used for agricultural land area of 10 ha. Problems in the form of overlapping interests from various parties, there is no common perception about the function of the national park. This research aims to identify the causes of land conflicts in the national park area, along with solutions to conflict problems. This research is descriptive qualitative research with a method or approach to case studies. The selection of research locations was conducted through purposive sampling techniques with village criteria bordering the Alas Purwo National Park area, where there is a conflict of interest between the community and the manager of the national park area. Data collection through interviews, observations and documentation studies. Data analysts use interactive models, namely: data reduction, data presentation and conclusion withdrawal. The results of the study showed the efforts made by the national park in resolving the conflict that occurred in the Patuk Block, until now there has been no meeting point and results agreed upon by both sides. Land conflict resolution uses problem solving strategies that are integrative solutions for the realization of a joint agreement on the sustainability of conservation areas.

Keywords : *Conflict, Alas Purwo National Park, Solutions*

ABSTRAK

Konflik sejak tahun 2000 antara masyarakat dan pihak Taman Nasional Alas Purwo, dipicu oleh perambahan kawasan hutan oleh masyarakat yang digunakan untuk lahan pertanian seluas 10 ha. Permasalahan berupa tumpang tindih kepentingan dari berbagai pihak, belum adanya kesamaan persepsi mengenai fungsi taman nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik lahan yang ada di kawasan taman nasional, beserta solusi pemecahan masalah konflik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Alas Purwo, dimana terjadi konflik kepentingan antara masyarakat dan pengelola kawasan taman nasional. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan upaya yang dilakukan pihak taman nasional dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Blok Patuk, sampai saat ini belum ada titik temu dan hasil yang disepakati kedua belah pihak. Penyelesaian konflik lahan menggunakan strategi problem solving yang bersifat solusi integratif demi terwujudnya kesepakatan bersama terhadap kelestarian kawasan konservasi.

Kata Kunci: Konflik, Taman Nasional Alas Purwo, Solusi Penyelesaiannya

PENDAHULUAN

Pengelolaan kawasan konservasi khususnya Taman Nasional dapat dikatakan berhasil, jika tercapai tiga sasaran konservasi (Liao & Chan, 2016). Sasaran konservasi meliputi, terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan (perlindungan sumber penyangga kehidupan), menjamin terpeliharannya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistem (pengawetan sumber plasma nuftah), mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya (pemanfaatan secara lestari). Kawasan konservasi termasuk taman nasional di seluruh Indonesia, mempunyai permasalahan yang dapat mengancam kelestariannya. Salah satunya permasalahan berupa tumpang tindih kepentingan dari berbagai pihak, belum adanya kesamaan persepsi mengenai fungsi taman nasional, kedudukan dan peran taman nasional dimata masyarakat dan pihak terkait lainnya (Najib, 2020). Berbagai perbedaan kepentingan sebagaimana disebutkan di atas mengakibatkan terjadinya konflik yang akan mempengaruhi pengelolaan taman nasional secara keseluruhan (Sitthisuntikul & Horwitz, 2015).

Menurut Fisher, konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Pada tahap sebelum konflik terdapat sesuatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak, sehingga menimbulkan konflik (Ratnasari, 2019). Konflik akan terjadi apabila ada perbedaan pemahaman antara dua orang atau lebih terhadap berbagai perselisihan, ketegangan diantara pihak yang tidak sepaham (Bonsu et al., 2019). Konflik sumberdaya alam berbasis masyarakat dapat terjadi pada tingkat lokal, seringkali melibatkan pelaku regional, nasional, bahkan global. Mulai konflik diantara orang per orang atas penggunaan lahan sampai pada konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat yang berselisih tentang kendali atas tanah dan hutan (Bayramov, 2018).

Konflik yang terjadi di Taman Nasional Alas Purwo, berupa sengkata lahan yang terjadi antara pengelola taman nasional dengan masyarakat yang diwakili oleh Forum Peduli Tanah Pusaka (FPTP). Konflik berawal dari Tahun 2000 perambahan kawasan hutan oleh masyarakat yang digunakan untuk lahan pertanian seluas 10 ha di Blok Patuk. Blok Patuk merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang paling barat, masuk wilayah kerja Resort Grajagan Seksi Pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo wilayah I. Lebih jauh lagi persoalan-persoalan struktural seperti ini sering berakar pada kondisi yang sangat lama, seperti cara bagaimana

kesejahteraan diciptakan atau kekuasaan diciptakan (Herdiansyah, Soepandji, Seda, & Dewi, 2014).

Konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo disebabkan karena tupang tindih pemanfaatan lahan. Banyaknya kepentingan, baik kepentingan Pemerintah dalam pemanfaatan sumberdaya alam hayati. Masing-masing pihak merasa benar dan memiliki alasan yang kuat untuk mempertahankan kawasan. Konflik yang terjadi akan meluas jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada terjadinya tindak kekerasan yang akan merugikan kedua belah pihak. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai analisis penyebab konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo, sehingga konflik-konflik yang terjadi dapat dipetakan dengan jelas dan upaya-upaya penyelesaian konflik oleh kedua belah pihak. Tujuan penelitian untuk mendapatkan gambaran penyebab dan jenis-jenis konflik salah satu peristiwa yang terjadi di Taman Nasional Alas Purwo, beserta solusi penyelesaiannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Konflik sumberdaya alam di Indonesia telah berlangsung sejak masa penjajahan Belanda. Konflik bersumber dari penguasaan lahan disebabkan adanya sifat dualitas dalam sistem penguasaan lahan, yaitu hukum Eropa dan hukum adat (Ramadhan & Budimanta, 2014). Konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku (Mirin & Klinck, 2021). Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan manusia yang mempunyai karakteristik beragam (Alam, 2016). Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial, sistem sosial, bangsa, suku, agama. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Studi mengenai fenomena konflik lingkungan lebih mudah daripada konflik sosial, yaitu ketika isu lingkungan mengemuka dan menjadi fokus perhatian (Dendup et al., 2021). Konflik lingkungan yang terjadi memiliki dimensi yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan para pemangku kepentingan (Anthwal, Gupta, Sharma, Anthwal, & Kim, 2010). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan, bukan hanya persoalan fisik tetapi juga mencakup dimensi kepentingan subjek pelakunya (Tengö et al., 2007).

Sejumlah literatur tentang teori konflik yang masih relevan dengan kondisi sumberdaya alam di Indonesia saat ini. Secara berturut-turut dikemukakan empat teori dalam memahami konflik sumberdaya alam dan lingkungan (Baiquni & Rijanta, 2007).

1. Teori Ketamakan (*The Greedy Theory*)

Teori yang mengungkapkan timbulnya gejala perilaku ketamakan dan kerakusan dalam berhubungan antara manusia dengan lingkungan, maupun antara manusia dengan manusia lainnya. Konflik lingkungan yang ditimbulkan akibat penguasaan sumberdaya alam lebih dipicu oleh nafsu tamak dan rakus, yang berakibat pada diskriminasi kepentingan masyarakat lain. Eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan dapat mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan, sehingga dapat menurunkan daya hidup masyarakat lain.

2. NIMBY (*Not In My Back Yard*) Syndrome

Kemunculan teori ini disebabkan rendahnya kesadaran individu terhadap lingkungan sekitarnya. Konflik lingkungan yang bersumber pada pemindahan masalah ke tempat lain, merupakan gejala munculnya sikap individual bahwa masyarakat tidak mau menanggung masalah di sekitarnya akibat pencemaran lingkungan.

3. Memancing di Air Keruh (*Profit Taking*)

Muncul konflik merupakan peluang bagi pihak lain, pihak lain ini sering disebut pihak ketiga. Perannya dalam keterlibatan konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan, justru mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Berbagai konflik yang muncul dapat menjadi ajang untuk memperoleh keuntungan bagi sekelompok orang di atas penderitaan orang lain.

4. Teori Kemosotan dan Kelangkaan (*Deprivation and Scarcity*)

Teori ini menjelaskan adanya potensi kelangkaan sumberdaya alam, adanya kemerosotan yang berarti penurunan kondisi lingkungan. Berdampak timbulnya konflik sumberdaya bukan hanya antar individu tetapi antar bangsa. Konflik sering muncul ketika terjadi pelanggaran yang tidak dapat dikendalikan. Maka dalam situasi demikian perebutan dan konflik akan terjadi dalam memperebutkan sumberdaya yang terbatas. Teori-teori konflik tentang sumberdaya alam memberikan gambaran tentang dominasi kekuatan utama dunia dalam eksploitasi sumberdaya secara global (Katuwal, Zhang, Baral, Sharma, & Quan, 2021). Konflik yang berkait sumberdaya dan lingkungan di Indonesia yang justru menguat setelah otonomi, ternyata dapat dijelaskan melalui keempat teori di atas (Fitri, Ahmad, & Ahmad, 2015).

METODE PENELITIAN

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai September 2019 pada kawasan Taman Nasional Alas Purwo, tepatnya di SPTN I Tegaldlimo dan Dusun Grajagan Pantai, Blok Patuk, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi.

b. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode atau pendekatan studi kasus. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria desa yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Alas Purwo, dimana terjadi konflik kepentingan antara masyarakat dan pengelola kawasan taman nasional. Pengumpulan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih rinci mengenai penyebab konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci yang memiliki banyak informasi. Informan dalam penelitian ini, pengelola Taman Nasional Alas Purwo, Kepala Desa Grajagan, Ketua Forum Peduli Tanah Pusaka, masyarakat yang tinggal di Blok Patuk.

2. Observasi

Pengamatan langsung meliputi pemanfaatan lahan di Blok Patuk, dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai konflik kepentingan antara masyarakat dan pengelola Taman Nasional Alas Purwo.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung, terkait konflik yang terjadi dalam pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo. Data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen atau laporan kegiatan instansi terkait hasil-hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

c. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh kedalam sebuah kategori, menjabarkan data ke dalam unit-unit, menganalisis data yang penting, menyajikan data yang sesuai dengan masalah penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan. Aktivitas analisis data menggunakan model interaktif yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konflik Lahan Dalam Kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo adalah kawasan konservasi pelestarian alam yang terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Blok Patuk merupakan bagian dari Taman Nasional Alas Purwo yang paling barat, berbatasan langsung dengan kawasan hutan (Setiawan, Sukei, Hidayat, & Yuliati, 2021). Masyarakat yang berada di sekitar kawasan Blok Patuk, mayoritas bermatapencarian sebagai nelayan. Sejak tahun 2000 mereka juga melakukan perambahan kawasan hutan seluas 10 ha. Beberapa faktor pendorong terjadinya penyerobotan kawasan hutan, antara lain:

- a. Terjadinya musim paceklik yang panjang, sehingga nelayan kesulitan mendapatkan hasil tangkapan.
- b. Terjadinya pengungsian yang cukup besar dari daerah konflik Poso Sulawesi Tengah, sehingga mereka kembali ke daerah asal tanpa berbekal uang.
- c. Masyarakat mengklaim lahan tersebut sebagai milik leluhur mereka.

Pada awalnya masyarakat merambah kawasan hutan dengan alasan untuk menumpang menanam padi karena musim paceklik ikan yang berkepanjangan. Sehingga masyarakat memutuskan membuka lahan pertanian di kawasan Blok Patuk dalam kurun waktu yang lama. Rentetan peristiwa tersebut menjadikan masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut milik para leluhur mereka, meskipun tidak bisa menunjukkan bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. Sehingga menimbulkan konflik lahan dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo dalam pemanfaatan sumberdaya alam. Konflik berawal dari adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pihak pengelola Taman Nasional Alas Purwo. Konflik pemanfaatan sumberdaya hutan, lebih mengarah pada tanaman pertanian dan telah sampai pada upaya penguasaan lahan. Konflik semakin meruncing karena adanya perbedaan persepsi tentang peruntukan lahan dalam kawasan hutan sesuai dengan fungsi konservasi.

Konflik muncul sebagai perbedaan persepsi mengenai perbedaan kepentingan, dimana satu pihak merasa ada pihak lain yang memberikan pengaruh negatif kepadanya. Atau ketika satu pihak merasa kepentingannya telah memberikan pengaruh negatif kepada pihak lainnya. Setiap perbedaan sudut pandang merupakan sebuah potensi konflik yang muncul jika tidak ditangani dengan baik akan berubah menjadi konflik terbuka. Konflik dalam pemanfaatan sumberdaya alam yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo terjadi karena adanya pengalaman masa lalu yang dirasakan berbeda dengan saat ini. Kondisi ini dialami masyarakat sekitar Taman Nasional Alas Purwo dalam pemanfaatan sumberdaya alam, khususnya pemanfaatan lahan untuk tanaman padi. Kegiatan pemanfaatan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup telah dilakukan masyarakat dalam kawasan hutan, sebelum kawasan tersebut berubah fungsi menjadi kawasan konservasi.

Masyarakat ingin memanfaatkan lahan di kawasan Blok Patuk dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Upaya penguasaan lahan tersebut bertentangan dengan pihak Taman Nasional Alas Purwo terkait fungsi konservasi. Pihak Taman Nasional Alas Purwo memiliki kepentingan menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pihak Taman Nasional Alas Purwo membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum untuk membuktikan status tanah yang menjadi sengketa. Sehingga pihak Taman Nasional Alas Purwo bekerjasama dengan Kapolres Banyuwangi untuk menyelesaikan permasalahan lahan dan pengelolaan kawasan Blok Patuk.

Berdasarkan pemahaman mengenai teori konflik sumberdaya hutan, munculnya gejala konsep teori ketamakan karena kebutuhan manusia akan pemanfaatan lahan yang semakin tinggi. Konflik sumberdaya alam yang terjadi melibatkan berbagai kepentingan antar sektor dan pemangku kepentingan. Menurut Baiquni, ada empat teori dalam memahami konflik sumberdaya alam, yaitu teori ketamakan (*the greedy theory*), NIMBY syndrome, teori mengail di air keruh (*profit taking*), teori kemerosotan (*deprivation and scarcity*). Teori ini digunakan dalam memahami kondisi empirik konflik sumberdaya khususnya pemanfaatan lahan (Sumardjono, 1997). Berdasarkan teori konflik lingkungan yang disampaikan oleh Baiquni, maka konflik yang terjadi di Taman Nasional Alas Purwo termasuk dalam teori ketamakan (*the greedy theory*). Konflik lingkungan yang ditimbulkan dari penguasaan lahan hutan lebih dipicu oleh nafsu tamak dan rakus. Akibat eksploitasi alam dapat mengakibatkan kelangkaan dan kerusakan lingkungan.

2. Solusi Penyelesain Konflik dalam Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Alas Purwo

Manusia dalam berinteraksi dengan sesama tidak bisa dipisahkan dari konflik, akan tetapi tidak semua interaksi perlu melibatkan konflik. Hal ini disebabkan karena pada umumnya manusia bergaul dengan manusia lain, maupun dengan kelompok. Pergaulan itu dilakukan dengan penuh perhatian, kemampuan untuk saling membantu sehingga sedikit peluang akan timbulnya konflik. Jika konflik itu memang terjadi akan mudah untuk diatasi. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan sumberdaya alam, bukan untuk dihilangkan akan tetapi perlu dicarikan solusi sebagai jalan keluar. Demikian halnya dengan pihak yang memiliki posisi lemah tidak perlu diabaikan tetapi harus diberikan ruang untuk duduk bersama dan berdialog. Pada dasarnya konflik yang terjadi memiliki dua sisi baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, konflik dapat memfasilitasi tercapainya rekonsiliasi atas berbagai kepentingan dan mempererat ikatan kelompok. Sisi negatif, adanya konflik dapat membuka jalan terjadinya masalah yang timbul lebih besar.

Teori dasar dalam menyelesaikan konflik yang disebut dengan model kepedulian rangkap dua (*dual concern model*). Model ini melacak pemilihan strategis berdasarkan kekuatan kepedulian relatif atas hasil yang diterima oleh diri sendiri dan hasil yang diterima oleh pihak lain. Sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini:

Kepedulian terhadap hasil yang diterima orang lain	Yielding (Mengalah)	<i>Problem Solving</i> (Pemecahan masalah)
	Inaction & Withdrawing (Diam dan menarik diri)	Contending (Bertanding)
	Kepedulian terhadap hasil yang diterima diri sendiri	

Picture 1. Dual Concern Model As Basic Strategy For Conflict Resolution

Sifat dari masing-masing strategi tersebut di lakukan dengan berpegang pada rumusan, sebagai berikut:

a. *Contending* (bertanding)

Segala macam cara untuk menyelesaikan konflik menurut kemauan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya sendiri dan mencoba untuk membujuk pihak lain untuk

mengalah, termasuk mengeluarkan ancaman kepada pihak lain. Intinya mencoba menerapkan solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lain.

b. *Problem Solving* (pemecahan masalah)

Usaha mengidentifikasi masalah dan mengembangkan serta mengarah pada solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Bagi pihak yang menerapkan strategi ini berusaha mempertahankan aspirasinya sendiri, sekaligus berusaha mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak lain. Hasilnya dapat berupa kompromi yang mencerminkan adanya keinginan untuk berkolaborasi. Intinya mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

c. *Yielding* (mengalah)

Pihak yang menerapkan strategi ini menurunkan aspirasinya sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Mengalah memang mampu menciptakan solusi, tetapi bukan solusi yang berkualitas baik.

d. *Inaction* (diam)

Tidak melakukan apa-apa, strategi ini biasanya ditempuh untuk mencermati perkembangan lebih lanjut, tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian konflik.

e. *Withdrawing* (menarik diri)

Pihak yang lebih memilih strategi ini memilih untuk meninggalkan situasi konflik secara pamanen, baik secara fisik maupun psikologis. Menarik diri mempunyai konotasi pemaksaan yang jauh lebih dalam, dimana situasi ketidakpastian sengaja diciptakan sehingga pihak lain tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan yang pada akhirnya akan mengalah.

Meskipun terdapat lima strategi yang berbeda dalam upaya penyelesaian konflik, akan tetapi kebanyakan situasi konflik yang terjadi menuntut diterapkannya beberapa kombinasi strategi di atas. Jarang hanya menggunakan satu macam strategi saja secara eksklusif. Dari pihak Taman Nasional Alas Purwo telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dalam pemanfaatan lahan di kawasan Blok Patuk, melalui koordinasi dan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Hingga saat ini belum ada hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pihak Taman Nasional Alas Purwo juga telah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menunjukkan

bukti hukum atas kepemilikan lahan, jika lahan tersebut dianggap milik para leluhur mereka, namun hingga saat ini belum dapat membuktikannya. Berbagai upaya musyawarah maupun dialog dengan masyarakat telah dilakukan untuk mencari jalan terbaik, namun dari pihak masyarakat tetap tidak mau bekerjasama dalam kasus ini. Masyarakat tetap bersikeras melanjutkan kegiatan pertanian di Blok Patuk, sesuai keyakinan bahwa tanah tersebut milik leluhur mereka.

Berbagai upaya yang dilakukan pihak Taman Nasional Alas Purwo dalam menyelesaikan konflik sengketa pengelolaan kawasan, menggunakan strategi *inaction* (diam). Pihak taman nasional menggunakan strategi *inaction* (diam) dalam menyingkapi permasalahan terkait pemanfaatan kawasan taman nasional untuk kegiatan pertanian dalam kawasan Blok Patuk. Sedangkan dari pihak masyarakat menggunakan strategi *contending* (bertanding) dalam menyikapi penyelesaian kepada pihak taman nasional. Strategi *contending* yang dilakukan dari pihak masyarakat tercermin dari sikap tetap mempertahankan bukti atas kepemilikan lahan dan tetap berkeinginan memiliki lahan secara permanen.

Pruit dan Rubin (2009), strategi penyelesaian konflik yang dilakukan pihak Taman Nasional Alas Purwo terhadap masyarakat belum optimal karena tidak ada penyelesaian masalah yang bersifat integratif yang diakui kedua belah pihak. Hal ini pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya penyelesaian konflik dari pihak taman nasional. Penting dilakukan kesepakatan bersama untuk mengupayakan adanya solusi integratif dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.

KESIMPULAN

Perambahan yang terjadi di Blok Patuk menimbulkan konflik yang terjadi antara pihak Taman Nasional Alas Purwo dan masyarakat terkait klaim lahan dalam kawasan taman nasional. Kegiatan pemanfaatan lahan seluas 10 ha sejak tahun 2000 secara ilegal oleh masyarakat di Blok Patuk yang masuk wilayah Taman Nasional Alas Purwo. Upaya yang dilakukan pihak taman nasional dalam mengatasi konflik adalah dengan duduk bersama bermusyawarah dan berdialog. Strategi penyelesaian konflik yang ditempuh oleh pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, terdiri dari *problem solving* (pemecahan masalah), *yielding* (mengalah), *inaction* (diam).

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, D. (2016). ROLE PLAYERS ANALYSIS DALAM KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011). *ROLE PLAYERS ANALYSIS DALAM KONFLIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011)*, 7(1), 16–36. <https://doi.org/10.14710/politika.7.1.2016.16-36>
- Anthwal, A., Gupta, N., Sharma, A., Anthwal, S., & Kim, K. H. (2010). Conserving biodiversity through traditional beliefs in sacred groves in Uttarakhand Himalaya, India. *Resources, Conservation and Recycling*, 54(11), 962–971. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2010.02.003>
- Baiquni, M., & Rijanta, R. (2007). Konflik pengelolaan lingkungan dan sumberdaya dalam era otonomi dan transisi masyarakat. *Bumi Lestari Journal of Environment*, 7(1). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/2414>
- Bayramov, A. (2018). Review: Dubious nexus between natural resources and conflict. *Journal of Eurasian Studies*, 9(1), 72–81. <https://doi.org/10.1016/j.euras.2017.12.006>
- Bonsu, N. O., McMahon, B. J., Meijer, S., Young, J. C., Keane, A., & Dhubháin, Á. N. (2019). Conservation conflict: Managing forestry versus hen harrier species under Europe’s Birds Directive. *Journal of Environmental Management*, 252(April). <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.109676>
- Dan, T., & Budaya, R. (2016). Budaya Lokal Sebagai Media Resolusi Dan Pengendalian Konflik Di Provinsi Maluku (Kajian, Tantangan Dan Revitalisasi Budaya Pela). *POLITIKA : Jurnal Ilmu Politik*, 6(2), 93-100–100. <https://doi.org/10.14710/politika.6.2.2015.93-100>
- Dendup, P., Wangdi, L., Jamtsho, Y., Kuenzang, P., Gyeltshen, D., Tashi, T., ... Tshering, B. (2021). Bird diversity and conservation threats in Jigme Dorji National Park, Bhutan. *Global Ecology and Conservation*, 30(March), e01771. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01771>
- Fitri, I., Ahmad, Y., & Ahmad, F. (2015). Conservation of Tangible Cultural Heritage in Indonesia: A Review Current National Criteria for Assessing Heritage Value. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 184(August 2014), 71–78. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.05.055>

- Herdiansyah, H., Soepandji, B. S., Seda, F. S., & Dewi, O. (2014). Conflict Management of Renewable Natural Resources in the Border of Indonesia-Malaysia: Sustainable Environmental Approach. *Procedia Environmental Sciences*, 20, 444–450. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.056>
- Katuwal, H. B., Zhang, M., Baral, H. S., Sharma, H. P., & Quan, R. C. (2021). Assessment of farmers' knowledge and perceptions towards farmland birds show the need of conservation interventions. *Global Ecology and Conservation*, 27, e01563. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01563>
- Liao, K. H., & Chan, J. K. H. (2016). What is ecological wisdom and how does it relate to ecological knowledge? *Landscape and Urban Planning*, 155, 111–113. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.07.006>
- Mirin, B. H., & Klinck, H. (2021). Bird singing contests : Looking back on thirty years of research on a global conservation concern. *Global Ecology and Conservation*, 30(July), e01812. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01812>
- Najib, K. (2020). Government Ecology and the Indigenous Religion of the Suku Anak Dalam: Intersubjective Relations in Forest Conservation in Jambi, Indonesia. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 26(3), 303–315. <https://doi.org/10.7226/JTFM.26.3.303>.
- Pruit, D,G & Rubin, J,Z. (2009). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ramadhan, D., & Budimanta, A. (2014). Resolusi Konflik Antara Masyarakat Lokal Dengan Perusahaan Pertambangan (Studi Kasus: Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Ilmu Lingkungan*, 12(2), 92–104. Retrieved from <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/10535>
- Ratnasari, Y. (2019). *KONFLIK ANTARWARGA DESA: Analisis Simon Fisher Melalui Studi Kasus*. 21(1), 74–96.
- Setiawan, E., Sukesi, K., Hidayat, K., & Yuliati, Y. (2021). Conservation of Natural Resource Management in the Buffer Village Community of Alas Purwo Banyuwangi National Park East Java Indonesia Based on Local Wisdom. *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 13(1), 100–111. <https://doi.org/10.26905/lw.v13i1.5109>
- Sitthisuntikul, K., & Horwitz, P. (2015). Collective Rituals as Meaningful Expressions of the

Relationships between People, Water and Forest: A Case Study from Northern Thailand. *Journal of Intercultural Studies*, 36(1), 88–103. <https://doi.org/10.1080/07256868.2014.990365>

Sumardjono, M. S. W. (1997). Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui lembaga mediasi. *Era Hukum No 11/Th 3/1997*, 13(2015), 803–818.

Tengö, M., Johansson, K., Rakotondrasoa, F., Lundberg, J., Andriamaherilala, J. A., Rakotoarisoa, J. A., & Elmqvist, T. (2007). Taboos and forest governance: Informal protection of hot spot dry forest in southern Madagascar. *Ambio*, 36(8), 683–691. [https://doi.org/10.1579/0044-7447\(2007\)36\[683:TAFGIP\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1579/0044-7447(2007)36[683:TAFGIP]2.0.CO;2)